

# RDP RUU IKN

DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK  
OLEH ;

Dr. Chazali H. Situmorang, M.Sc  
Dosen AP FISIP UNAS

# Asas dalam Naskah Akademik

- **Asas Kesetaraan** (Peluang ekonomi untuk semua) Strategi ekonomi yang berorientasi pada masa depan dan akses yang adil ke pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang kerja.
- **Asas Keseimbangan Ekologis** (Mendesain sesuai Kondisi Alam ) Menghormati dan merangkul alam melalui integrasi dan pelestarian bentang alam yang ada.
- **Asas Ketahanan** (Sirkular dan Tangguh) Sistem kota (air, energi, sampah) yang sirkular dan terintegrasi, dengan fleksibilitas untuk mengatasi kemungkinan volatilitas global dan pertumbuhan kota yang terencana.

- **Asas Berkelanjutan** (IKN yang Rendah Emisi Karbon) Aspirasi kondisi masa depan yang mencerminkan peralihan menuju 100% energi bersih dan mendorong kegiatan rendah karbon.
- **Asas Kelayakan Hidup/ Liveability** (Aman dan Terjangkau) Desain kota yang berfokus pada masyarakat dengan perumahan dan pembangunan berkonsep mixed-use (mixed-use development) guna memastikan lingkungan yang aman, sehat, dan adil bagi penduduk saat ini dan yang akan datang.
- **Asas Konektivitas** (Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses) Strategi mobilitas terintegrasi yang menempatkan warga di garis depan dengan menekankan kemudahan berjalan kaki (walkability) dan transportasi umum.

- **Asas Kota Cerdas** (Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi) Infrastruktur SMART yang meningkatkan efisiensi dan memungkinkan pencapaian aspirasi aspirasi kota.
- **Asas Kebhinnekaan** (Bhinneka Tunggal Ika dan keindahan khas Indonesia) Kota yang merepresentasikan Indonesia, memelihara kekayaan budaya, memperkuat inklusi sosial, dan memberikan rasa gotong royong di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Seharusnya : **Kebhinnekaan dan Ketunggal Ikaan**

# Landasan UU Dasar 945

- Pasal 18B UUD 1945 berisi
- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang
- ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup ...
- **Dalam Draft RUU , bukan saja merujuk pada ayat 1), tetapi juga ayat 2) sebagai satu kesatuan**

# Kebijakan Publik

- Konsep Kebijakan public simple saja yaitu:
- Serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.
- Kebijakan public itu mencakup 3 hal:
- Perencanaan ( merumuskan masalah public), karena adanya gap (delta)
- Implementasi
- Evaluasi.....efektif dan efisien

# Prinsip Umum Kebijakan Publik

- Landasan hukum (regulasi) harus menjadi fondasi dari Kebijakan Publik, yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara/Pemerintah
- Final goal : Wwlfare state
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik:
  - Manajemen pembangunan yang baik dan solid;
  - Bertanggung jawab
  - Prinsip demokrasi
  - Pasar yang efisien
  - Penghindaran salah alokasi dana investasi
  - Pencegahan korupsi
  - Menciptakan disiplin anggaran
  - menyediakan pelayanan kepada warga masyarakat dan melindungi dari berbagai tindakan sewenang-wenang terhadap diri, hak maupun harta benda masyarakat.

# Dalam RUU IKN

- Harus jelas dan definitive, bagaimana irisan regulasi dengan UU lainnya, misalnya UU tentang Pemerintah Daerah, UU Sektor Pembangunan yang terkait dengan wilayah cakupan IKN yang baru
- Karakter IKN, apakah hanya terbatas sebagai Ibu Kota Pemerintahan saja (Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan dengan 3 pilar eksekutif, legislative, dan yudikatif), apakah juga sebagai kota perdagangan/bisnis, dan juga kota kebudayaan.
- Sejauh mana manfaat dan kepentingan masyarakat local terjamin kesejahteraanya dengan adanya IKN baru
- Aspek skala prioritas, sejauh mana tingkat urgensi dari IKN baru, dalam suasana pandemic Covid-9, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak cukup mendukung

- Perlu dipertimbangkan juga kondisi psikologi masyarakat, atas persoalan beban utang yang besar yang harus ditanggung masyarakat, kemnafaatan secara langsung oleh masyarakat
- Apakah penentuan lokasi IKN sudah membuka partisipasi masyarakat untuk penentuannya?
- Bagaimana bentuk pengelolaan IKN yang ideal. Apakah dengan lembaga pemerintah setingkat menteri (Otoritas IKN), atau otonom dengan Lembaga Gubernur yang dipilih rakyat secara langsung atau sistem perwakilan (DPRD),
- Semua pilihan itu, beririsan dengan UU lain yang terkait yang harus disesuaikan

# Pentingnya IKN baru

- Dari NA , cukup alasan untuk adanya IKN baru bagi Indonesia, dan sudah lama di rencanakan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno
- Persoalannya, apakah tepat dan mendesak, saat sekarang ini dibahas RUU IKN. Pemerintah dan DPR harus dapat menjelaskan rasionalitasnya dengan Bahasa mudah dimengerti oleh masyarakat, dengan melakukan sosialisasi yang substansif.
- Isu sensi, terkait asset milik negara yang ada di DKI, mekanisme yang diatur dalam RUU itu ada dua cara, pemindah tanganan dan pemanfaatan oleh BUMN, atau tender .
- Mekanisme tender ini, sangat rawan potensi terjadinya fraud.

- Pemerintah dan DPR, harus berhitung betul, pelaksanaan IKN baru pada semester I tahun 2024, apakah situasi Politik dan social ekonomi memungkinkan, karena masa transisi pemerintah dan suasana Pemilu.
- Isu Kalimantan sebagai paru dunia, apakah tidak menyukitkan Indonesia dalam dunia Globa terkait isu Iklim Global.
- Agar dihindari kesan, proses pembahasan RUU IKN ini terburu-buru, sehingga adanya banyak kelemahan dalam norma-normanya, dan akhirnya menjadi sasaran Judicial Review ke MK oleh kelompok masyarakat.

terimakasih